



**KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

KAJIAN FISKAL REGIONAL



**Triwulan II
2021**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab : Syafriadi
Ketua Tim : Mohamad Hadad
Koordinator : Oktana Yudha Sakti
Editor & Desain Grafis : Arriza Adiya
Anggota : Zulfan
Alfa M. H. Simanungkalit
Mahyiddin
Dewi Wahyuni
Luthfiya Nazla Marpaung



-Halaman ini sengaja dikosongkan-

KAJIAN FISKAL REGIONAL PROVINSI ACEH TRIWULAN II 2021



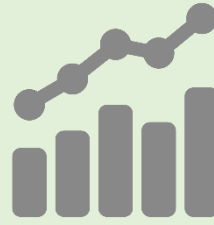
REALISASI PENDAPATAN

RP1,53T PAJAK (31,02%)
RP435,55M PNBPN (104,99%)

CAPAIAN APBN

REALISASI BELANJA

RP20,81T (43,07%)



REALISASI PENDAPATAN

RP1,61T PAD (30,03%)
RP12,63T TRANSFER (37,50%)
RP52,18M LAIN-LAIN (6,91%)

CAPAIAN APBD

REALISASI BELANJA

RP11,98T (27,89%)

NASIONAL

7,07



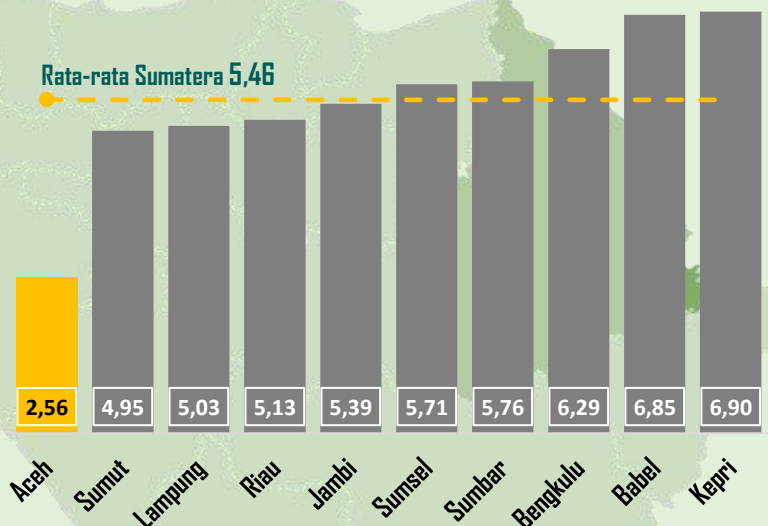
ACEH
2,56



Pertumbuhan Ekonomi
Nasional dan Ekonomi
Aceh s/d Triwulan II 2021

PERTUMBUHAN EKONOMI

Rata-rata Sumatera 5,46



CAPAIAN

INDIKATOR PEMBANGUNAN



PERTUMBUHAN EKONOMI

Target RKP Aceh 2021 : 5,00%
Capaian s.d Triwulan II : 2,56%



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Target RKP Aceh 2021 : 72,48
Capaian s.d 2020 : 71,99



ANGKA KEMISKINAN

Target RKP Aceh 2021 : 12,43%
Capaian s.d Maret 2021 : 15,33%



ANGKA PENGANGGURAN

Target RKP Aceh 2021 : 6,22%
Capaian s.d Februari 2021 : 6,30%



ANGKA KETIMPANGAN (RASIO GINI)

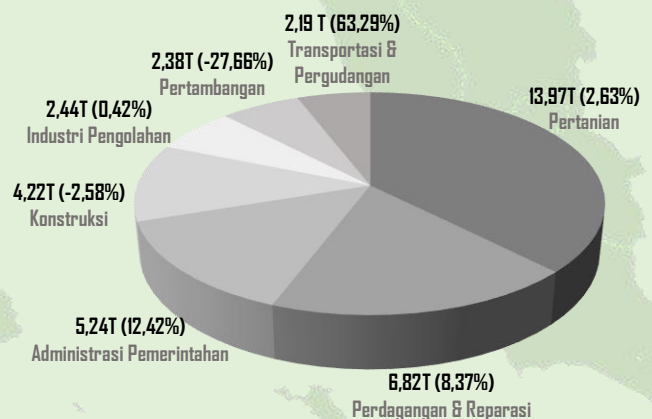
Target RKP Aceh 2021 : 0,324
Capaian s.d Maret 2021 : 0,324



INFLASI

Target RKP Aceh 2021 : 4,00%
Capaian s.d Triwulan II : 2,37%

KONTRIBUSI & PERTUMBUHAN 7 SEKTOR TERBESAR PDRB ACEH



DAFTAR ISI

Infografis	i
Daftar Isi	ii
I. Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional	1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
Inflasi	2
Indikator Kesejahteraan	3
II. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN	5
Pendapatan Negara	5
Belanja Negara	8
Prognosis Realisasi APBN	11
III. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD	13
Pendapatan Daerah	14
Belanja Daerah	17
Prognosis Realisasi APBD	18
IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD)	19
Pendapatan Konsolidasian	19
Belanja Konsolidasian	21
Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Indikator Ekonomi Regional	22
V. Berita / Isu Fiskal Terpilih	23
Potensi Investasi Pemerintah Bagi Komoditas Unggulan Aceh	23
Nilam Sebagai Potensi Nilai Tambah Sektor Pertanian Aceh	25

I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

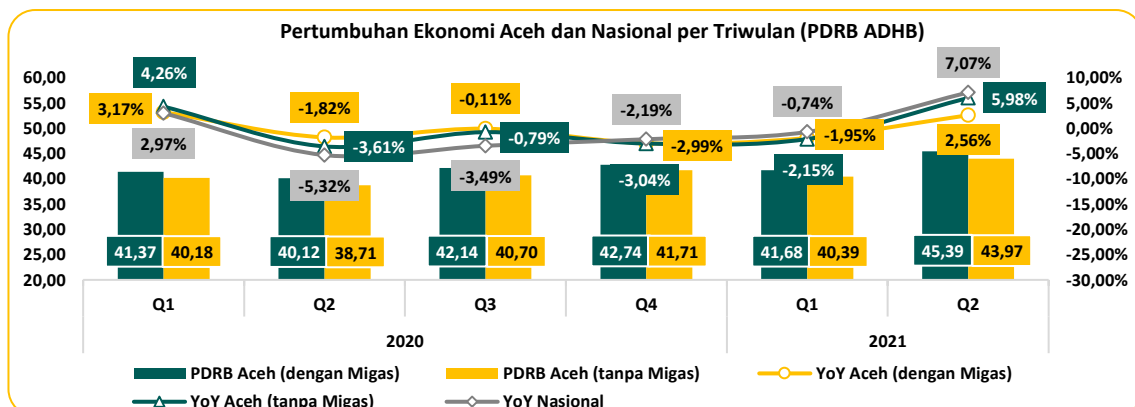
Sampai dengan Triwulan II 2021, Ekonomi Aceh tumbuh sebesar 2,56 persen (*y-on-y*), persentase Penduduk Miskin 15,33 persen (per Maret 2021), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,30 persen (per Februari 2021), IPM sebesar 71,99 (per 2020), Ketimpangan/Gini Ratio sebesar 0,324 (per Maret 2021), dan Inflasi sebesar 2,37 persen (*y-on-y* per Juni 2021). Terdapat beberapa indikator pembangunan yang belum sesuai target, imbas dari pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia termasuk Provinsi Aceh. Persentase penduduk Miskin pada Triwulan II 2021 mengalami kenaikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang mana angka kemiskinan ini telah melebihi target serta diiringi dengan meningkatnya angka pengangguran. Dampak dari pandemi *Covid-19* masih dirasakan oleh masyarakat terutama pada sektor ekonomi, untuk itu pemerintah harus menciptakan lapangan kerja sebagai dorongan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, seperti pemanfaatan program modal padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah.

Perbandingan Target dalam KUA Provinsi Aceh dengan Capaian s.d Triwulan II 2021

Indikator Ekonomi Makro	Target KUA Aceh 2021	Aceh Q2 2021	Nasional Q2 2021
Pertumbuhan Ekonomi	5,75%	2,56%	7,07%
Kemiskinan	12,43%	15,33%	10,14%
Pengangguran	6,22%	6,30%	6,26%
IPM	72,48	71,99	71,90
Gini Ratio	0,324	0,324	0,384
Inflasi	4,00	2,37	1,33

Sumber: Bappeda Aceh, BPS Aceh, 2021 (diolah)

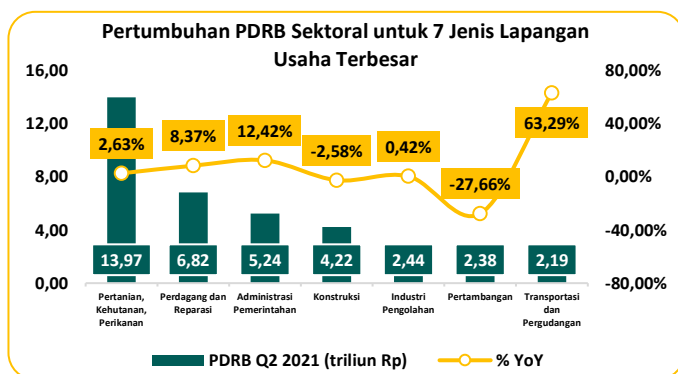
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah)

PDRB Aceh (ADHB) pada Triwulan II 2021 sebesar 45,39 triliun, dan secara agregat 2021 (ditambah triwulan I) sebesar 87,07 triliun. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada Triwulan II 2021 mencapai 2,56 persen, sedangkan ekonomi nasional

mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,07 persen. Jika komponen migas dihilangkan, ekonomi Aceh mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,98 persen. Adanya penghentian produksi di PT. PIM menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi dengan migas menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tanpa migas.

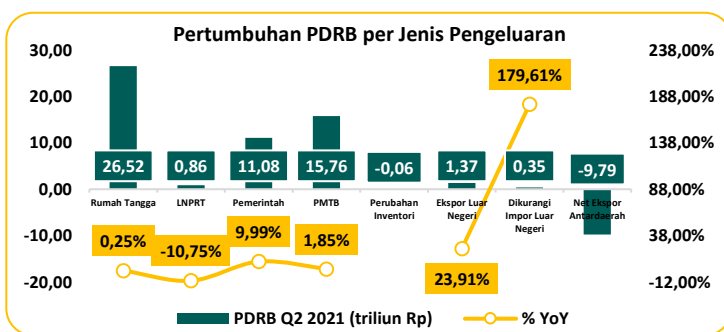


Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah)

Dari 7 Jenis Lapangan Usaha Terbesar penunjang Pertumbuhan PDRB, terdapat 2 sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu sektor Konstruksi (-2,58%), dan Pertambangan (-27,66). Sektor Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan masih menjadi sektor dengan share tertinggi dalam struktur PDRB Aceh yaitu 13,97 triliun atau 30,78 persen dari total PDRB Aceh Triwulan II 2021.

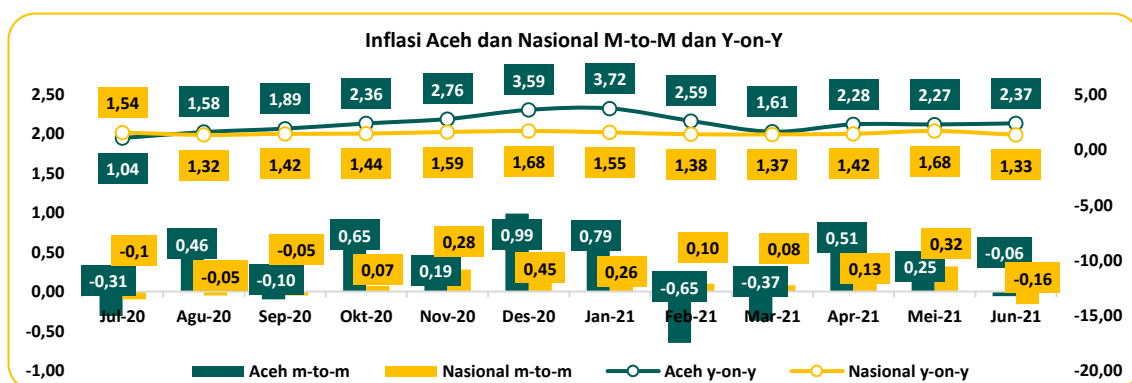
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi kontributor tertinggi dalam ekonomi Aceh, diikuti PMTB dan Belanja Pemerintah. Dikurangi Impor Luar Negeri



Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah)

mengalami kenaikan paling besar yaitu sebesar 179,61 persen, dan Pengeluaran Konsumsi LNRT mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar 10,75 persen.

B. Inflasi



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2021 (diolah)

Secara *m-to-m*, pada tiga bulan terakhir tercatat inflasi Aceh mengalami penurunan hingga bulan Juni mengalami deflasi sebesar 0,06 persen, di mana ini masih lebih tinggi dibandingkan Nasional yang juga mengalami deflasi sebesar -0,16

Kontribusi Kelompok Pengeluaran Pada Inflasi Aceh

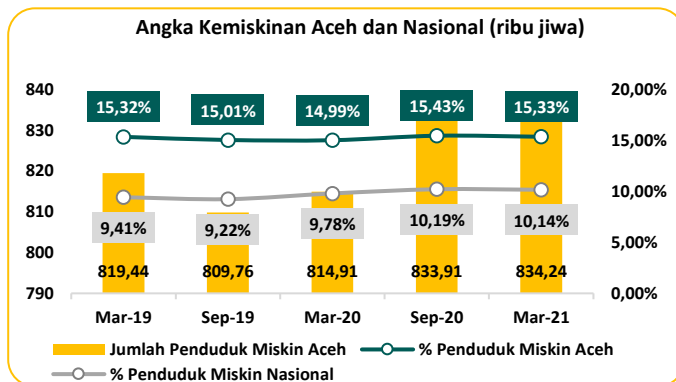
Kelompok Pengeluaran	IHK	IHK	Y-on-Y
	Juni 2020	Juni 2021	
Makanan, Minuman, dan Tembakau	104,85	110,33	5,23
Pakaian dan Alas Kaki	106,83	107,19	0,34
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,53	102,28	0,74
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,19	104,28	1,06
Kesehatan	110,47	113,28	2,54
Transportasi	103,69	105,21	1,47
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	99,92	100,14	0,22
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	109,1	109,31	0,19
Pendidikan	102,84	104,84	1,94
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	107,04	107,93	0,83
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110,14	113,38	2,94

Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah)

persen. Secara *y-on-y*, pada tiga bulan terakhir tercatat inflasi Aceh mengalami fluktuasi, sejak Agustus 2020 inflasi Aceh lebih tinggi dari inflasi nasional, hal ini menunjukkan masih berdampak pandemi *Covid-19* secara nasional. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami peningkatan inflasi paling signifikan secara *y-on-y* yaitu sebesar 5,23 persen, diikuti Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 2,94 persen dan Kelompok Kesehatan sebesar 2,54 persen.

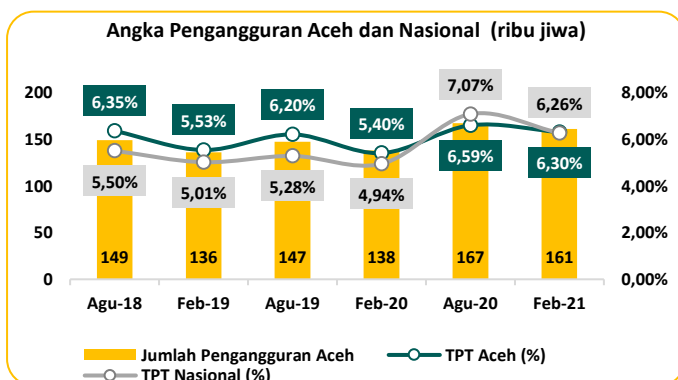
C. Indikator Kesejahteraan

Persentase penduduk miskin Aceh cenderung mengalami penurunan meskipun sempat mengalami kenaikan pada September 2020. Pada periode Maret 2021 mengalami penurunan secara persentase namun mengalami kenaikan



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2021 (diolah)

secara jumlah penduduk miskin apabila dibandingkan dengan periode September 2020. Pada Periode September 2020 angka kemiskinan Aceh berada di level 15,43 persen atau sebesar 833,91 ribu jiwa dan pada periode Maret turun menjadi 15,33 persen atau sebesar 834,24 ribu jiwa. Apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional, angka tersebut lebih tinggi di mana persentase penduduk miskin secara nasional pada Maret 2021 berada pada level 10,14 persen, kondisi ini bahkan selalu terjadi dalam beberapa periode terakhir.

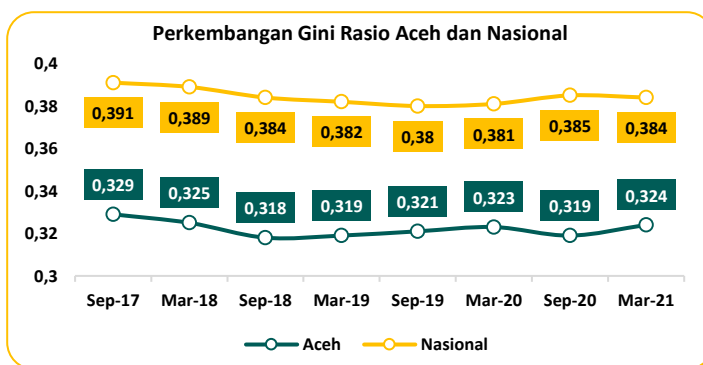


Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2021 (diolah)

Dari sisi angka pengangguran tercatat jumlah pengangguran Aceh per Februari 2021 sebanyak 161 ribu orang, turun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2020 yang sebanyak 167 ribu orang. Tingkat

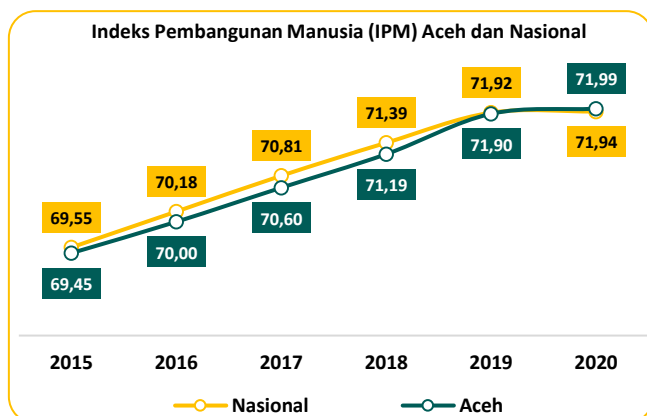
Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2021 sebesar 6,30 persen, turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2020 yang mencapai 6,59 persen. Tren TPT Aceh mengalami fluktuasi sejak Agustus 2018, meskipun demikian dalam 4 tahun terakhir secara mayoritas TPT Aceh selalu lebih tinggi dibandingkan TPT secara nasional kecuali pada bulan Agustus 2020 yang sebesar 7,07 persen.

Dari sisi ketimpangan, data BPS menunjukkan bahwa posisi Rasio Gini Aceh per Maret 2021 berada pada level 0,324, angka ini mengalami kenaikan dibanding September 2020 yang tercatat sebesar 0,319. Angka tersebut



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2021 (diolah)

juga terhitung lebih rendah jika dibandingkan dengan Rasio Gini nasional yang sebesar 0,384. Namun demikian, meskipun secara pemerataan pendapatan selalu lebih rendah, secara bersamaan PDRB per Kapita Aceh juga selalu lebih rendah dibanding PDRB per kapita secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Aceh mengalami rata ke bawah, yang mana hal ini juga terlihat dari angka kemiskinan Aceh yang masih tinggi.



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2021 (diolah)

Dari sisi pembangunan manusia, data BPS terakhir menunjukkan bahwa IPM Aceh sampai dengan tahun 2020 berada pada level 71,99, angka ini meningkat sebesar 0,09 poin dibandingkan 2019 yang sebesar 71,90. IPM Aceh termasuk dalam kategori IPM Tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$).

Angka IPM Aceh tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan IPM Nasional yang sebesar 71,94, bahkan tren kenaikan IPM Aceh terhitung stabil dari tahun ke tahun. Diharapkan tren positif ini dapat terus berlanjut, di tengah pemerintah Aceh yang terus fokus dalam peningkatan dunia pendidikan di Aceh, baik dalam hal peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi di Aceh, serta pemberian beasiswa untuk putra-putri Aceh baik di dalam maupun luar negeri.

II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Sampai dengan Triwulan II 2021, realisasi pendapatan APBN adalah sebesar Rp1,96 triliun (36,77 persen). Realisasi tersebut mengalami kenaikan secara nominal dan persentase dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,86 triliun (28,84 persen). Atas capaian tersebut, proporsi realisasi pendapatan APBN tersebut menggambarkan bahwa kontribusi pendapatan pajak sebesar 77,82 persen, sementara kontribusi PNBPN sebesar 22,18 persen.

LRA APBN Lingkup Provinsi Aceh (miliar Rp)

Uraian	2020			2021		
	Pagu	Realisasi Q2	%	Pagu	Realisasi Q2	%
A. Pendapatan	6.439,27	1.857,12	28,84%	5.341,29	1.963,77	36,77%
Pajak	5.816,28	1.472,08	25,31%	4.926,44	1.528,22	31,02%
PNBP	622,99	385,04	61,81%	414,85	435,55	104,99%
B. Belanja	47.083,87	21.078,83	44,77%	48.333,92	20.816,41	43,07%
Belanja Pusat	13.176,58	5.245,74	39,81%	14.647,44	6.254,79	42,70%
Belanja Pegawai	6.805,39	3.038,65	44,65%	7.040,87	3.410,16	48,43%
Belanja Barang	4.123,30	1.412,53	34,26%	4.829,48	1.811,06	37,50%
Belanja Modal	2.204,82	781,19	35,43%	2.738,46	1.016,51	37,12%
Belanja Bantuan Sosial	43,07	13,37	31,05%	38,64	17,06	44,15%
Transfer ke Daerah	33.907,29	15.833,10	46,70%	33.686,48	14.561,61	43,23%
Dana Bagi Hasil	1.140,42	301,03	26,40%	612,56	396,59	64,74%
Dana Alokasi Umum	14.315,42	8.087,73	56,50%	14.051,12	7.349,89	52,31%
Dana Alokasi Khusus	5.343,30	1.967,66	36,82%	5.961,19	2.185,89	36,67%
Dana Otsus dan DID	8.128,05	2.568,07	31,60%	8.074,99	2.526,33	31,29%
Dana Desa	4.980,09	2.908,61	58,40%	4.986,62	2.102,91	42,17%
C. Surplus/ Defisit APBN	(40.644,60)	(19.221,71)	47,29%	(42.992,64)	(18.852,64)	43,85%

Sumber: OM SPAN dan Simtrada 2021 (diolah)

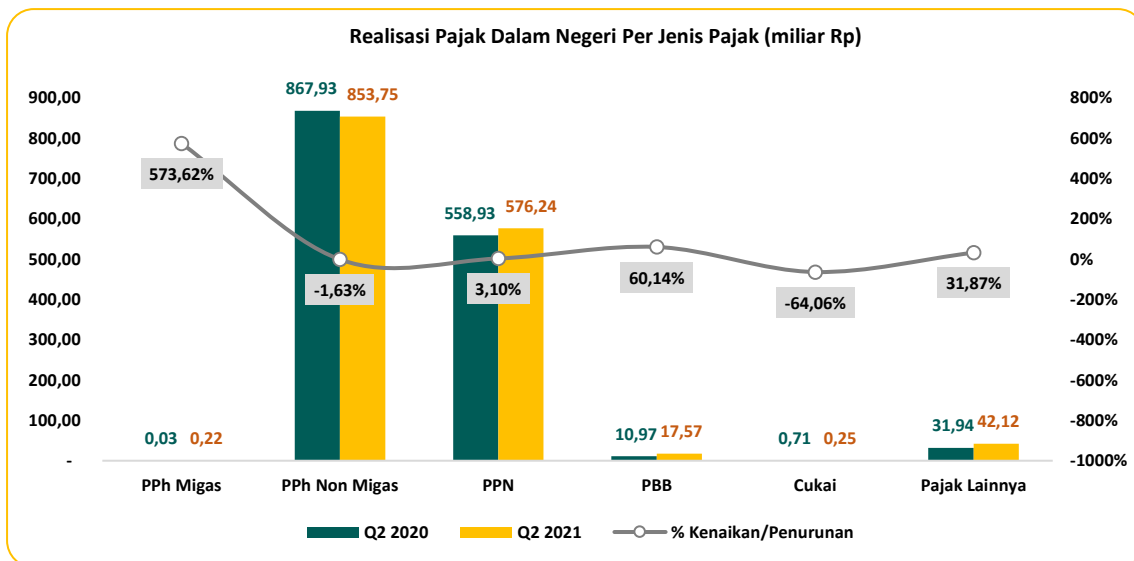
Di sisi belanja, realisasi belanja APBN sampai dengan Triwulan II 2021 adalah sebesar Rp20,81 triliun (43,07 persen). Capaian ini mengalami penurunan secara nominal dan persentase dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp21,08 triliun (44,77 persen). Proporsi realisasi belanja APBN sebesar 30,05 persen merupakan kontribusi Belanja Pusat, dan 69,95 persen merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

A. Pendapatan Negara

1. Pendapatan Pajak

a. Pajak Dalam Negeri

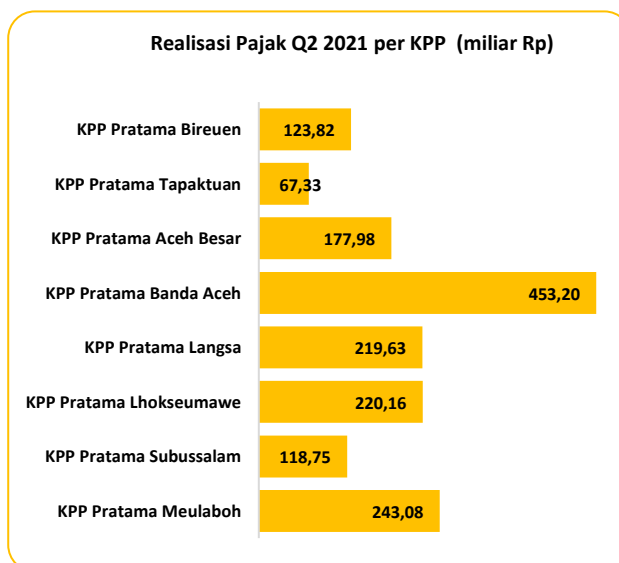
Total realisasi penerimaan pajak dalam negeri di Aceh sampai dengan Triwulan II 2021 sebesar Rp1,49 triliun. Berdasarkan jenis pajak, proporsi terbesar dari total realisasi pajak dalam negeri di Aceh yaitu berasal dari PPh Non Migas yaitu sebesar 57,29 persen, diikuti PPN sebesar 38,67 persen.



Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)

Secara *y-on-y*, PPh Non Migas sebagai kontributor terbesar pajak dalam negeri mengalami penurunan sebesar 2 persen. Hal ini menunjukkan melambatnya profibilitas badan usaha non migas yang ada di Aceh. PPh Migas mengalami kenaikan *y-on-y* paling signifikan yaitu sampai 574 persen dari realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan data dari Kanwil DJP Aceh, mayoritas penerimaan pajak dalam negeri di Aceh berada di area KPP Pratama Banda Aceh dengan kontribusi sebesar 27,91 persen. Selain merupakan pusat perekonomian di Aceh, banyaknya proyek pemerintah yang dilaksanakan di Kota Banda Aceh juga menjadi faktor banyaknya sumber penerimaan pajak di Kota Banda Aceh. Terbanyak kedua yaitu

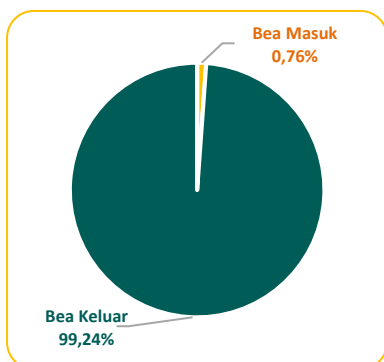


Sumber: Kanwil DJP Aceh, 2021 (diolah)

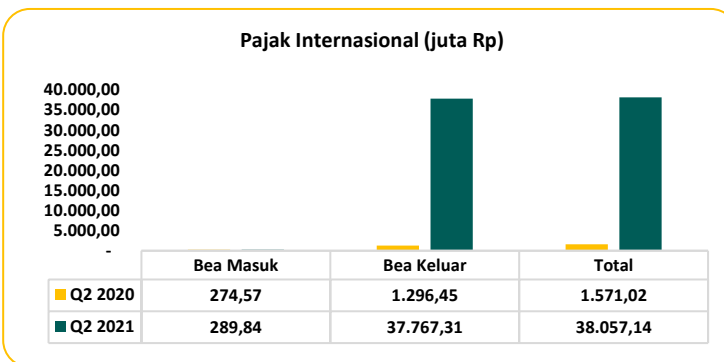
KPP Pratama Meulaboh dengan kontribusi penerimaan pajak sebesar 14,97 persen. KPP Pratama Tapaktuan menjadi daerah dengan realisasi penerimaan pajak paling kecil di sepanjang Triwulan II 2021, seperti yang tergambar dalam grafik di atas.

b. Pajak Perdagangan Internasional

Komposisi Pajak Perdagangan Internasional di Aceh sampai dengan Triwulan II 2021 terdiri dari dua jenis pajak yaitu Bea Masuk (dengan proporsi 0,76 persen) dan Bea Keluar (dengan proporsi 99,24 persen).

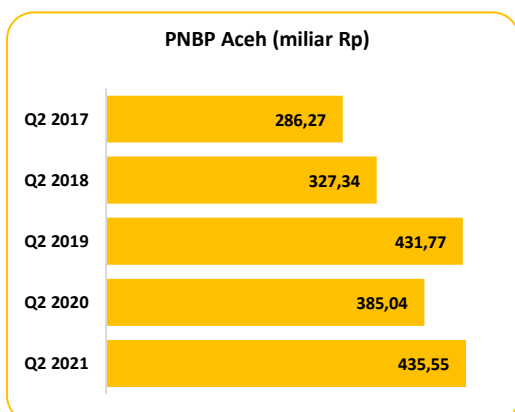


Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)



Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, total realisasi pajak internasional di Aceh mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kenaikan tersebut berasal dari Bea Keluar yang mengalami peningkatan sebesar Rp36,47 miliar dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan aktivitas ekspor-impor yang terjadi di Aceh selama periode tahun 2021 setelah pada tahun sebelumnya minim aktivitas ekspor-impor yang terjadi di Aceh akibat dari pandemi *Covid-19*.

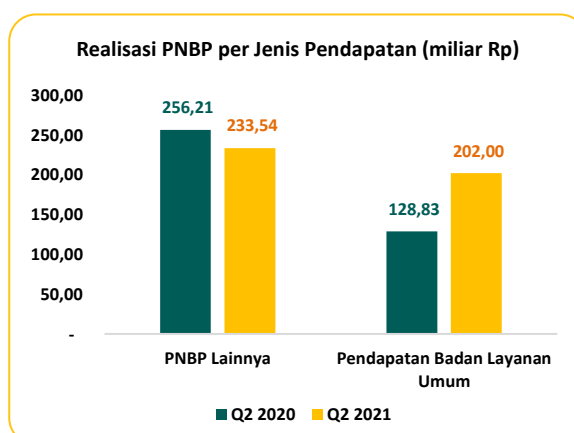
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Sumber: OM SPAN, 2021(diolah)

PNBP di Aceh menyumbang kontribusi sebesar 22,18 persen dari total pendapatan APBN di Aceh sampai dengan Triwulan II 2021. Tercatat posisi terakhir realisasi PNBP Aceh sampai dengan Triwulan II 2021 yaitu sebesar Rp435,55 miliar, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp385,04 miliar.

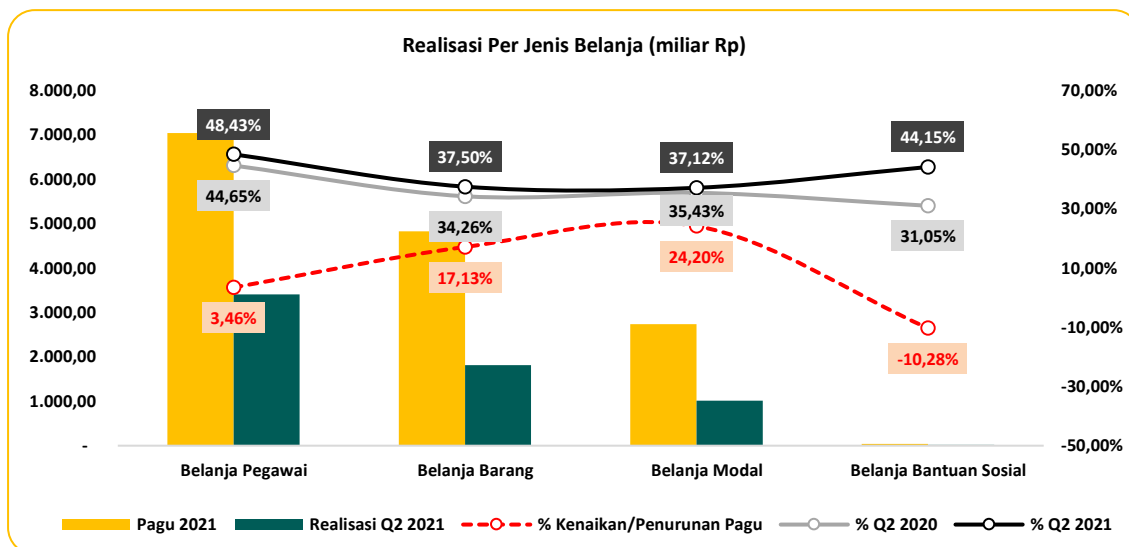
PNBP Lainnya sebagai kontributor terbesar dalam realisasi PNBP Aceh, mengalami penurunan sebesar 8,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya Pendapatan Badan Layanan Umum mengalami kenaikan yaitu sebesar 56,79 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)

B. Belanja Negara

1. Belanja Pusat



Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)

Belanja Pegawai masih menjadi jenis belanja dengan proporsi terbesar dalam struktur belanja pusat di Aceh yaitu sebesar 48,07 persen dari total pagu belanja pusat. Pada Tahun 2021, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan pagu akibat dari penyesuaian anggaran seiring dengan upaya pemerintah mengendalikan dampak perekonomian sejak pandemi *Covid-19*. Beberapa penurunan alokasi anggaran pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021 juga mempengaruhi penurunan pagu Belanja Bantuan Sosial di Tahun 2021. Secara keseluruhan, realisasi belanja mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perkembangan Belanja Pusat per Fungsi (miliar Rp)

Fungsi	Pagu 2020	Realisasi Q2 2020	% Q2 2020	Pagu 2021	Realisasi Q2 2021	% Q2 2021	% Kenaikan/Penurunan Pagu	% Kenaikan/Penurunan Realisasi
Pelayanan Umum	8.147,20	3.935,37	48,30%	9.167,73	3.255,88	35,51%	12,53%	-17,27%
Pertahanan	2.295,67	990,14	43,13%	2.357,97	1.072,27	45,47%	2,71%	8,29%
Ketertiban Dan Keamanan	2.324,48	1.099,90	47,32%	2.550,75	1.303,09	51,09%	9,73%	18,47%
Ekonomi	2.341,39	910,05	38,87%	3.117,24	1.283,14	41,16%	33,14%	41,00%
Lingkungan Hidup	228,65	93,70	40,98%	318,59	129,95	40,79%	39,34%	38,69%
Perumahan Dan Fasilitas Umum	456,91	128,23	28,06%	625,81	236,69	37,82%	36,97%	84,58%
Kesehatan	233,40	90,10	38,60%	287,07	107,59	37,48%	23,00%	19,42%
Pariwisata Dan Budaya	1,90	-	0,00%	-	-	0,00%	-100,00%	0,00%
Agama	373,30	154,40	41,36%	413,47	175,79	42,52%	10,76%	13,85%
Pendidikan	3.991,72	1.538,79	38,55%	4.022,45	1.661,50	41,31%	0,77%	7,97%
Perlindungan Sosial	18,01	3,42	18,98%	30,26	3,60	11,90%	68,06%	5,34%
Total	20.412,62	8.944,10	43,82%	22.891,33	9.229,50	40,32%	12,14%	3,19%

Sumber: MonevPA, 2021 (diolah)

Atas 11 Fungsi Belanja dalam dua tahun terakhir, prioritas pembangunan pemerintah pusat di Aceh adalah Fungsi Pelayanan Umum, diikuti oleh Fungsi Pendidikan sebagai prioritas berikutnya. Tingginya porsi Belanja Fungsi Pelayanan Umum dan Pendidikan di Aceh menandakan bahwa pemerintah pusat mengarahkan kebijakan fiskal untuk membangun pelayanan umum dan kualitas sumber daya manusia di Aceh. Dampaknya tercermin dari peningkatan angka IPM Aceh dan pertumbuhan ekonomi secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, yang mana unsur pendidikan menjadi salah satu indikatornya.

Tahun 2021 Fungsi Perlindungan Sosial mengalami kenaikan pagu yang paling tinggi yaitu sebesar 68,06 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan pagu paling rendah dialami Fungsi Pariwisata dan Budaya akibat tidak adanya alokasi belanja Fungsi Pariwisata dan Budaya di Tahun 2021. Kenaikan pagu tertinggi pada Fungsi Perlindungan Sosial mengindikasikan pemerintah masih berfokus terhadap pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Covid-19*.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak Tahun 2020 menyebabkan terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,65 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan penurunan realisasi TKDD sampai dengan Triwulan II 2021 sebesar 8,03 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika diuraikan per jenis transfer, Dana Bagi Hasil mengalami penurunan pagu yang cukup besar yaitu sebesar 46,29 persen dibandingkan tahun 2020. Dari segi realisasi sampai dengan Triwulan II 2021, peningkatan paling signifikan terjadi pada Dana Alokasi Khusus Fisik yang meningkat sebesar 56,17 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

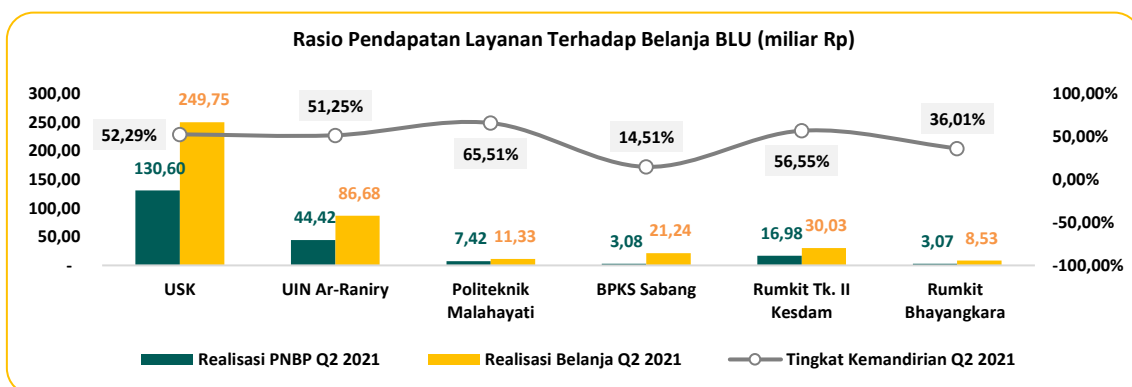
Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (miliar Rp)

Jenis Transfer	2020			2021			% Kenaikan/ Penurunan Pagu	% Kenaikan/ Penurunan Realisasi
	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Pagu	Realisasi	% Realisasi		
DBH	1.140,42	301,03	26,40%	612,56	396,59	64,74%	-46,29%	31,75%
DAU	14.315,42	8.087,73	56,50%	14.051,12	7.349,89	52,31%	-1,85%	-9,12%
DAK	5.343,30	1.967,66	36,82%	5.961,19	2.185,89	36,67%	11,56%	11,09%
DAK Fisik	1.953,86	134,57	6,89%	2.530,64	210,16	8,30%	29,52%	56,17%
DAK Non Fisik	3.389,45	1.833,09	54,08%	3.430,55	1.975,73	57,59%	1,21%	7,78%
Otsus dan DID	8.128,05	2.568,07	31,60%	8.074,99	2.526,33	31,29%	-0,65%	-1,63%
Otsus	7.555,28	2.266,58	30,00%	7.555,83	2.266,75	30,00%	0,01%	0,01%
DID	572,77	301,49	52,64%	519,16	259,58	50,00%	-9,36%	-13,90%
Dana Desa	4.980,09	2.908,61	58,40%	4.986,62	2.102,91	42,17%	0,13%	-27,70%
TOTAL	33.907,29	15.833,10	46,70%	33.686,48	14.561,61	43,23%	-0,65%	-8,03%

Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)

3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat

Sejak Tahun 2020 Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dan Rumah Sakit Tk.II Banda Aceh Kesdam di Banda Aceh telah resmi berstatus BLU. Saat ini telah terdapat enam satker BLU di Aceh. Empat satker sebelumnya yaitu BPKS Sabang, UIN Ar-Raniry, Politeknik Pelayaran Malahayati dan Universitas Syiah Kuala telah terlebih dahulu berstatus BLU.



Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)

Kemandirian BLU dapat dilihat dari seberapa besar ketergantungan suatu BLU terhadap RM, yang artinya bisa dilihat dari seberapa besar kontribusi pendapatan layanan BLU terhadap total belanja yang direalisasikan di tahun yang bersangkutan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa diantara enam satker BLU Pusat di Aceh, sampai dengan Triwulan II 2021, tidak ada pendapatan satker BLU Pusat yang melebihi realisasi belanjanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan seluruh BLU Pusat di Aceh terhadap alokasi dana APBN untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

4. Manajemen Investasi Pusat

Penyaluran KUR di Prov. Aceh per Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Akad		Rata-Rata Kredit per Debitur (juta Rp)
	Penyaluran (miliar Rp)	Debitur (orang)	
Perdagangan Besar dan Eceran	395,83	7.851	50,42
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	291,00	7.584	38,37
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	83,39	1.903	43,82
Industri Pengolahan	75,94	1.920	39,56
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	35,27	875	40,30
Perikanan	23,19	584	39,74
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	18,40	419	43,87
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	9,44	95	99,81
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,85	153	51,23
Konstruksi	1,97	21	95,51
Jasa Pendidikan	0,35	7	52,59
TOTAL	942,62	21.411	44,03

Sumber: SIKP, 2021 (diolah)

Nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Aceh hingga Triwulan II 2021 mencapai Rp942,62 miliar, dengan jumlah debitur sebanyak 21.411 debitur. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa rata-rata per debitur memiliki kredit sebesar Rp44,03 juta. Dari 11 kategori jenis usaha debitur KUR di Aceh, penyaluran untuk Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi yang terbesar yaitu sebesar 41,99 persen dari total KUR yang tersalur. Terbesar kedua yaitu Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 30,87 persen dari total KUR yang tersalur. Sedangkan sektor dengan jumlah kredit terkecil berasal dari Sektor Jasa Pendidikan yang hanya sebesar Rp350 juta atau 0,04 persen dari total KUR yang tersalur di Aceh.

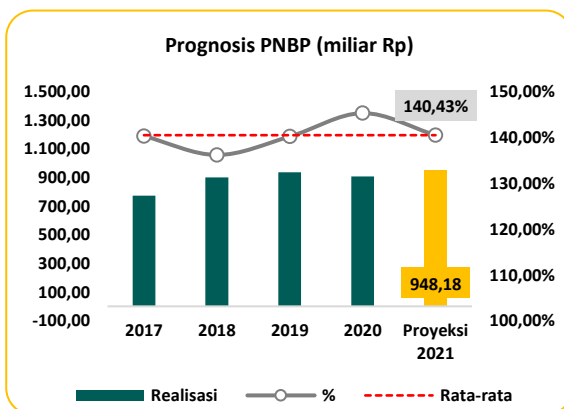
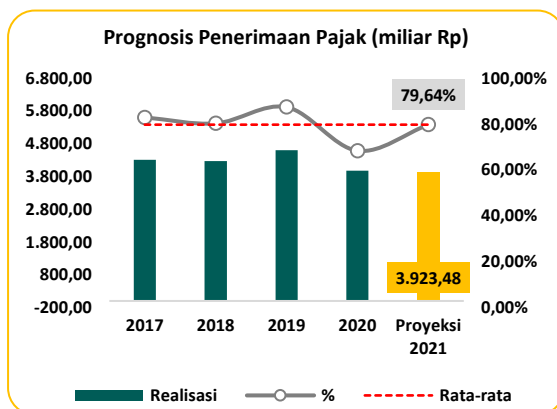
Sedangkan Nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat Ultra Mikro (KUR UMi) di wilayah Aceh hingga Triwulan II 2021 mencapai Rp73,88 miliar, dengan jumlah debitur sebanyak 19.898 debitur dan disalurkan ke 22 Kab./Kota. Penyaluran di Kab. Aceh Timur menjadi yang terbesar yaitu sebesar Rp6,66 miliar atau 9,02 persen dari total KUR UMi yang tersalur. Sedangkan Kab. Aceh Tenggara menjadi daerah dengan jumlah penyaluran terkecil yaitu sebesar Rp593,15 juta atau sebesar 0,80 persen dari total KUR UMi yang tersalur di Aceh.

Penyaluran KUR UMi di Aceh per Kab./Kota

Kab./Kota	Debitur (orang)	Penyaluran (Juta Rp)
Kab. Aceh Timur	1.914	6.661,71
Kab. Aceh Tamiang	1.904	7.010,10
Kab. Aceh Utara	1.817	6.879,75
Kab. Aceh Besar	1.282	5.432,26
Kota Banda Aceh	1.224	4.718,89
Kab. Bireuen	1.185	4.222,84
Kab. Aceh Tengah	1.037	4.256,00
Kab. Bener Meriah	1.032	4.105,44
Kab. Pidie	1.000	3.523,00
Kab. Aceh Barat	996	3.868,17
Kab. Aceh Jaya	856	3.765,47
Kab. Aceh Barat Daya	845	2.818,00
Kota Lhokseumawe	834	3.418,30
Kota Langsa	806	2.990,75
Kab. Nagan Raya	727	2.408,50
Kab. Aceh Selatan	544	1.617,34
Kab. Aceh Singkil	492	1.603,91
Kota Subulussalam	403	1.243,50
Kab. Pidie Jaya	335	1.198,50
Kab. Gayo Lues	257	775,00
Kab. Simeulue	208	770,50
Kab. Aceh Tenggara	200	593,15
Total	19.898	73.881,07

Sumber: SIKP UMi, 2021 (diolah)

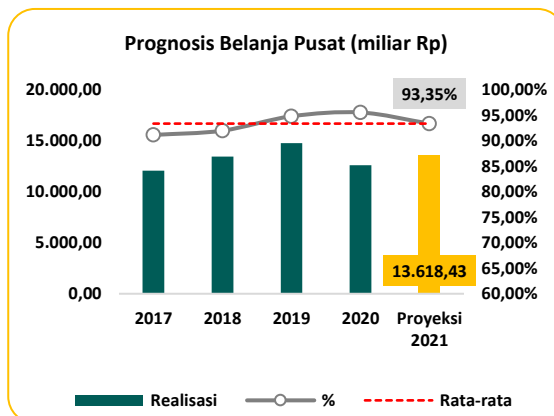
C. Prognosis Realisasi APBN



Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)

Prognosis realisasi Pendapatan Pajak, PNBP, dan Belanja Pusat dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi dalam 4 tahun terakhir. Realisasi Pendapatan Pajak pada akhir tahun 2021 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih

79,64 persen, dengan nominal realisasi ± Rp3,92 triliun. Realisasi PNBPN pada akhir tahun 2021 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih 140,43 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp948,18 miliar. Realisasi Belanja pada akhir tahun 2021 diproyeksikan akan terealisasi sebesar kurang lebih 93,35 persen, dengan nominal realisasi ± Rp13,2 triliun.



Sumber: OM SPAN, 2021 (diolah)

Untuk Prognosis TKDD dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi dalam 4 tahun terakhir, di mana DAU, Dana Desa serta Dana Otsus dan DID diproyeksikan akan terealisasi diatas 99 persen sampai dengan akhir tahun 2021, sedangkan DAK dan DBH diproyeksikan akan terealisasi masing-masing sebesar 94,12 persen dan 83,44 persen.

Prognosis TKDD 2021

Jenis Transfer	% Realisasi 2017	% Realisasi 2018	% Realisasi 2019	% Realisasi 2020	Rata-rata Realisasi 2017-2020	Pagu 2021 (miliar Rp)	Proyeksi Akhir Tahun 2021 (miliar Rp)
DBH	58,31%	84,34%	91,23%	99,87%	83,44%	612,56	511,10
DAK	92,47%	94,11%	92,82%	97,08%	94,12%	5.961,19	5.610,67
Dana Desa	99,88%	99,94%	99,91%	99,95%	99,92%	4.986,62	4.982,63
DAU	100,00%	100,00%	100,00%	99,45%	99,86%	14.051,12	14.031,71
Otsus & DID	100,00%	99,79%	100,00%	100,00%	99,95%	8.074,99	8.070,75

Sumber: Simtrada DJPK dan OM SPAN, 2021 (diolah)

Pendapatan APBN diproyeksikan akan teralisasi sebesar Rp4,87 triliun di mana pendapatan perpajakan di proyeksi berkontribusi sebesar Rp3,92 tiliun (79,64 persen) dan PNBPN berkontribusi sebesar Rp948,18 miliar (140,43 persen). Dari sisi pengeluaran, belanja APBN di proyesikan akan teralisasi sebesar 93,35 persen dengan nominal Rp13,61 triliun.

Prognosis Realisasi APBN lingkup Provinsi Aceh Tahun 2021

Uraian	% Realisasi 2017	% Realisasi 2018	% Realisasi 2019	% Realisasi 2020	Rata-rata Realisasi 2017-2020	Pagu 2021 (miliar Rp)	Proyeksi Akhir Tahun 2021 (miliar Rp)
Pendapatan Negara							4.871,66
Penerimaan Pajak	82,80%	80,20%	87,28%	68,28%	79,64%	4.926,44	3.923,48
PNBPN	140,24%	136,12%	140,12%	145,23%	140,43%	414,87	948,18
Belaja Negara	91,12%	91,97%	94,78%	95,52%	93,35%	14.588,70	13.618,43
Surplus/Defisit							(8.746,77)

Sumber: Simtrada DJPK, OM SPAN, 2021 (diolah)

III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Proporsi terbesar dari realisasi Pendapatan APBD di Aceh yaitu berasal dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar 88,34 persen dari total realisasi Pendapatan. PAD hanya memiliki porsi sebesar 11,30 persen dari total pendapatan, dan sisanya dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,36 persen. Artinya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Secara total, terjadi kenaikan realisasi Pendapatan APBD jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pagu dan Realisasi APBD (APBA + APBK) Lingkup Provinsi Aceh (miliar Rp)

Uraian	2020			2021		
	Pagu	Realisasi Q2	%	Pagu	Realisasi Q2	%
A. Pendapatan	40.215,58	13.600,77	33,82%	39.820,03	14.299,78	35,91%
Pendapatan Asli Daerah	5.666,69	2.002,69	35,34%	5.378,32	1.615,23	30,03%
Transfer Pemerintah Pusat	33.907,28	11.520,45	33,98%	33.686,48	12.632,36	37,50%
DBH	1.140,42	206,87	18,14%	612,56	276,04	45,06%
DAU	14.315,42	7.813,70	54,58%	14.051,12	7.024,86	49,99%
DAK	5.343,30	1.238,26	23,17%	5.961,19	1.832,64	30,74%
Dana Otsus dan DID	8.128,05	873,02	10,74%	8.074,99	2.476,67	30,67%
Dana Desa	4.980,09	1.388,60	27,88%	4.986,62	1.022,15	20,50%
Lain-Lain Pendapatan Daerah	641,61	77,63	12,10%	755,23	52,18	6,91%
B. Belanja	42.647,33	10.901,47	25,56%	42.949,43	11.980,07	27,89%
Belanja Daerah	38.251,88	9.463,47	24,74%	36.917,74	10.228,60	27,71%
Belanja Pegawai	15.862,03	5.460,06	34,42%	13.221,29	6.082,77	46,01%
Belanja Barang dan Jasa	12.565,19	2.722,70	21,67%	12.375,10	3.076,94	24,86%
Belanja Modal	8.398,09	667,00	7,94%	8.144,38	796,85	9,78%
Belanja Bantuan Sosial	234,81	258,43	110,06%	840,11	112,39	13,38%
Belanja Tak Terduga	262,11	141,78	54,09%	512,14	34,29	6,69%
Belanja Lainnya	929,65	213,51	22,97%	1.824,73	125,36	6,87%
Transfer	4.395,44	1.438,00	32,72%	6.031,69	1.751,47	29,04%
Belanja Bagi Hasil	980,86	137,22	13,99%	870,27	113,05	12,99%
Belanja Bantuan Keuangan	3.414,58	1.300,78	38,09%	5.161,42	1.638,42	31,74%
C. Surplus/Defisit	(2.431,75)	2.699,30	(111,00%)	(3.129,40)	2.319,72	-74,13%
D. Pembiayaan	2.431,75	546,78	22,49%	3.129,40	4.449,07	142,17%
Penerimaan Pembiayaan	2.485,78	561,78	22,60%	3.481,02	4.468,71	128,37%
Pengeluaran Pembiayaan	54,03	15,00	27,76%	351,62	19,64	5,59%
E. SILPA	0,00	3.246,08	0,00%	0,00	6.768,79	0,00%

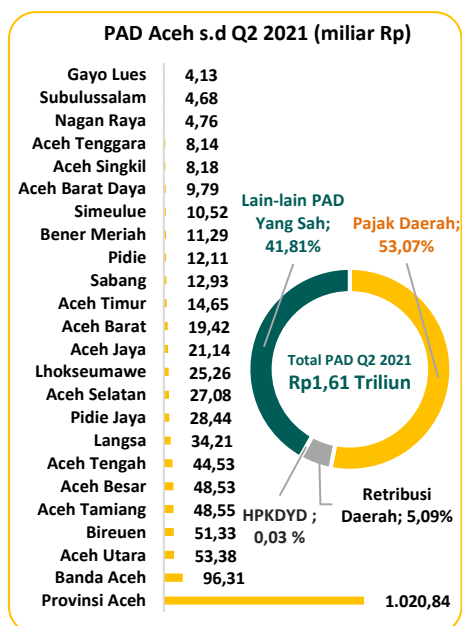
Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

Secara total, realisasi Belanja APBD mengalami kenaikan baik dari sisi nominal maupun dari sisi persentase, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pengesahan APBA 2021 yang dilakukan pada November 2020, menjadikan Aceh sebagai daerah dengan pengesahan APBD paling cepat di Indonesia, pengesahan APBA yang cepat ternyata memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas belanja pemerintah daerah pada Triwulan II 2021.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat tergambar dari kecilnya proporsi PAD dalam struktur APBD di Aceh. Data sampai dengan Triwulan II 2021 menunjukkan bahwa total realisasi PAD dari seluruh pemda di Aceh yaitu sebesar Rp1,61 triliun atau 11,30 persen dari total pendapatan daerah.

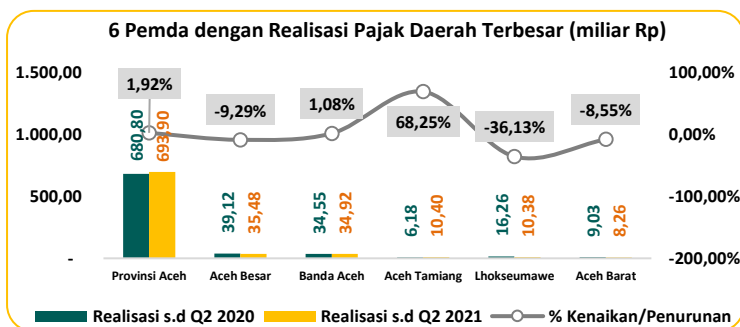


Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

Dari total realisasi PAD, porsi terbesar berasal dari Pajak Daerah (53,07 persen), diikuti Lain-lain Pendapatan Daerah (41,81 persen), Retribusi Daerah (5,09 persen), dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (0,03 persen).

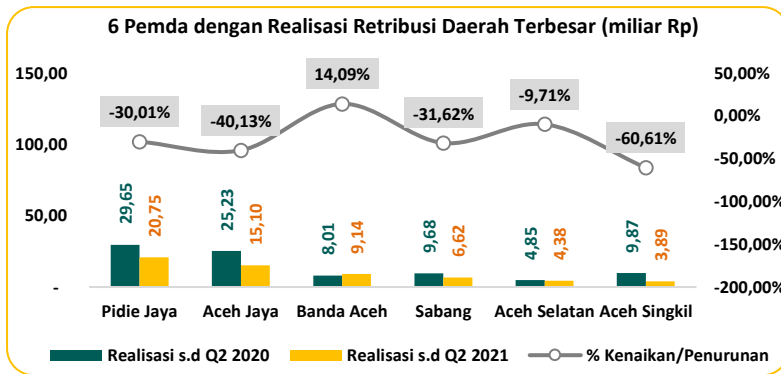
Jika dilihat dari realisasi per pemda, realisasi PAD hingga Triwulan II 2021 didominasi oleh penerimaan dari Pemda Provinsi Aceh dengan total realisasi sebesar Rp1,02 triliun, atau secara persentase sebesar 63,01 persen dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Jauh lebih tinggi dari daerah dengan realisasi PAD terbesar kedua yaitu Kota Banda Aceh yang sebesar Rp96,31 miliar atau secara persentase sebesar 5,94 persen dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Hal ini disebabkan sumber penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak provinsi lebih besar jika dibandingkan dengan pajak kabupaten/kota.

Terlihat dari enam pemda dengan realisasi pajak daerah terbesar di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh memiliki realisasi pajak daerah yang tertinggi dengan total realisasi



Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

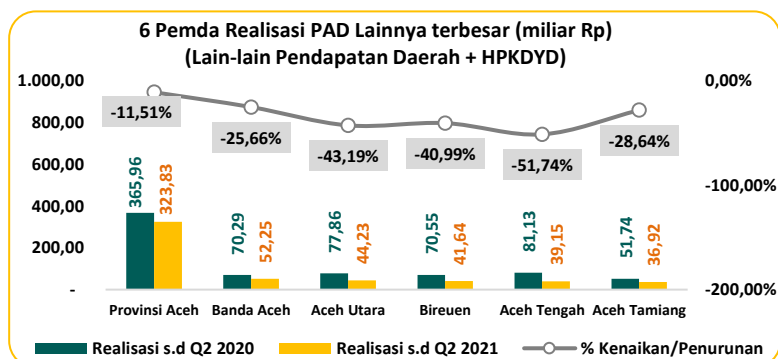
hingga Triwulan II 2021 sebesar Rp693,90 miliar. Realisasi Pajak Daerah untuk Provinsi Aceh mengalami kenaikan jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp680,80 miliar.



Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

pemda pada periode yang sama tahun sebelumnya menggambarkan progres yang kurang memuaskan dalam rangka menggali potensi penerimaannya. Dari 6 daerah dengan capaian realisasi pendapatan retribusi terbesar, Kab. Pidie Jaya menjadi daerah dengan kontribusi realisasi terbesar, realisasi Retribusi Daerah pada Kab. Pidie Jaya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (turun 30,01 persen). Peningkatan pendapatan Retribusi Daerah paling signifikan dialami Kota Banda Aceh, yaitu meningkat 14,09 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk realisasi PAD Lainnya terdiri dari Lain-lain Pendapatan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah



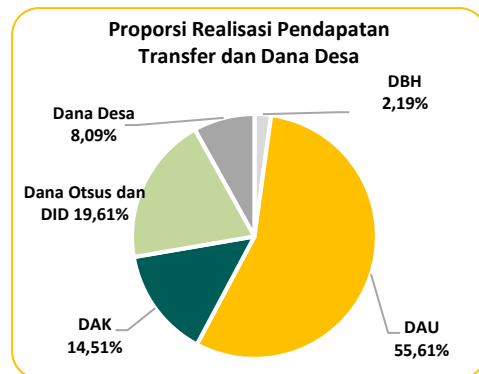
Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

sampai dengan Triwulan II 2021 telah terealisasi sebesar Rp677,38 miliar, terdiri dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan Zakat, Pendapatan Layanan BLUD, dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Sedangkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya terealisasi sebesar Rp531,89 juta atau secara proporsi hanya sebesar 0,03 persen dari total PAD. Dari jumlah keduanya, Provinsi Aceh menjadi pemda dengan realisasi tertinggi, sampai dengan Triwulan II 2021 telah terealisasi sebesar Rp323,83 miliar, diikuti Kota Banda Aceh dengan realisasi sebesar Rp52,25 miliar.

Salah satu komponen PAD yang lain yaitu Retribusi Daerah. Meskipun dalam komposisi PAD Aceh retribusi daerah tidak terlalu besar, namun realisasi yang dicapai

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat merupakan jenis pendapatan dengan *share* terbesar dari total realisasi pendapatan APBD di lingkup Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 88,31 persen. Persentase penyaluran pendapatan transfer sampai dengan Triwulan II 2021 tercatat sebesar 37,50 persen dari pagu tahun 2021.



Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (miliar Rp)

Jenis Transfer	2020			2021		
	Pagu	Realisasi Q2	%	Pagu	Realisasi Q2	%
Dana Perimbangan	20.799,14	9.258,83	44,52%	20.624,87	9.133,54	44,28%
DBH	1.140,42	206,87	18,14%	612,56	276,04	45,06%
DAU	14.315,42	7.813,70	54,58%	14.051,12	7.024,86	49,99%
DAK	5.343,30	1.238,26	23,17%	5.961,19	1.832,64	30,74%
Transfer Lainnya	13.108,14	2.261,62	17,25%	13.061,61	3.498,82	26,79%
Dana Otsus dan DID	8.128,05	873,02	10,74%	8.074,99	2.476,67	30,67%
Dana Desa	4.980,09	1.388,60	27,88%	4.986,62	1.022,15	20,50%
TOTAL	33.907,28	11.520,45	33,98%	33.686,48	12.632,36	37,50%

Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

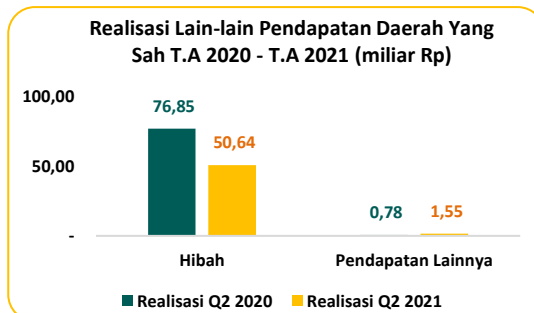
Apabila diuraikan per jenis Dana Perimbangan dan Transfer Lainnya, penurunan terjadi pada persentase penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Desa, sedangkan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Insentif Daerah mengalami kenaikan. Penyaluran Dana Alokasi Umum sampai dengan Triwulan II 2021 sebesar 49,99 persen, turun jika dibandingkan persentase penyaluran periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 54,58 persen, sedangkan Dana Desa teralisasi sebesar 20,50 persen, turun dibandingkan dengan penyaluran tahun sebelumnya yang sebesar 27,88 persen. Anggaran Dana Desa Tahun 2021 memprioritaskan penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa sebagai respon pemerintah terhadap dampak dari pandemi *Covid-19*.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan Triwulan II 2021 telah terealisasi sebesar Rp52,18 miliar, berkontribusi sebesar 0,36 persen terhadap total realisasi Pendapatan APBD Aceh Triwulan II 2021. Namun realisasi tersebut menurun jika dibandingkan realisasi pada Triwulan II 2020 yang sebesar Rp77,63 miliar.

Jika dirinci per jenis pendapatannya, kontribusi terbesar pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk realisasi Triwulan II 2021 berasal dari

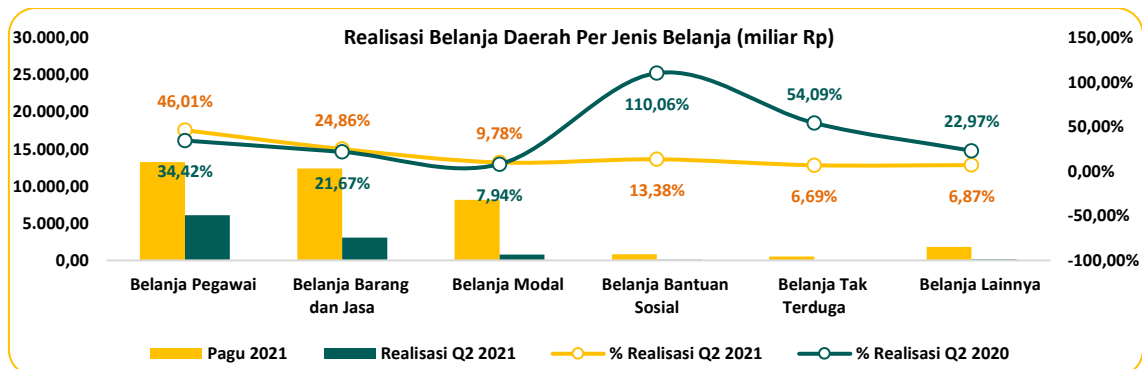
Pendapatan Lainnya dengan realisasi sebesar Rp1,55 miliar, diikuti Pendapatan Hibah yang sebesar Rp50,64 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, Dana Hibah mengalami penurunan realisasi sedangkan Pendapatan Lainnya mengalami kenaikan realisasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.



Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

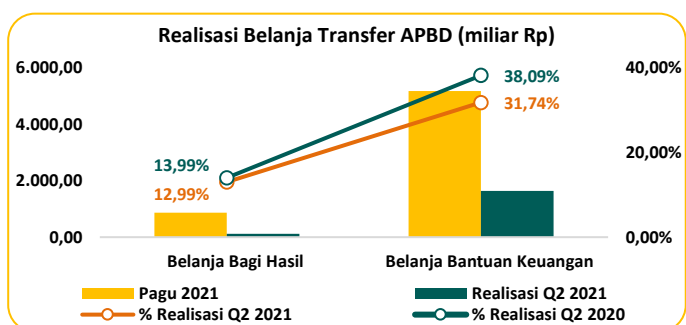
B. Belanja Daerah

Dalam struktur Belanja Daerah di Aceh, sampai dengan Triwulan II 2021 persentase realisasi tertinggi berada pada Belanja Pegawai yaitu sebesar 46,01 persen, meningkat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya (34,42 persen). Belanja Modal terealisasi sangat rendah sampai dengan Triwulan II 2021 yaitu sebesar 9,78 persen. Pengesahan APBA 2021 yang dilakukan pada November 2020 ternyata belum memberikan dampak terhadap peningkatan aktivitas belanja modal. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah mengingat Belanja Modal adalah jenis belanja yang diharapkan memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian.



Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

Belanja Transfer Antar Daerah dan Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil, dengan masing-masing realisasi sampai dengan Triwulan II 2021 sebesar Rp1,63 triliun dan Rp113,05 miliar. Secara persentase, Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar 31,74 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode

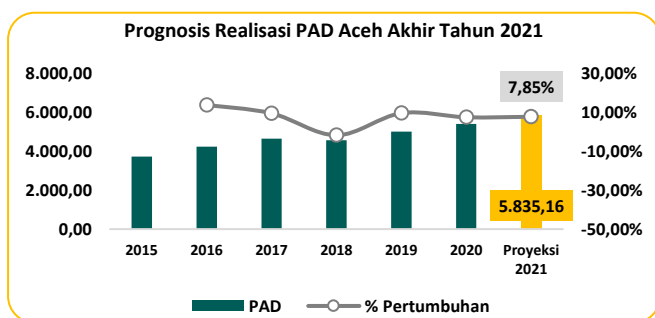


Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 38,09 persen, sedangkan Belanja Bagi Hasil terealisasi sebesar 12,99 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 13,99 persen.

C. Prognosis Realisasi APBD

Untuk proyeksi realisasi PAD dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan belanja daerah dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi belanja pada periode 2015-2020 yang kemudian menjadi pengali pagu belanja APBN tahun 2021.

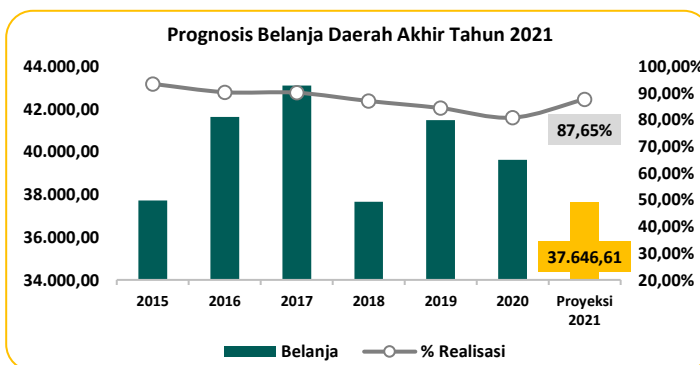


Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

Dengan memperhitungkan pertumbuhan rata-rata realisasi PAD dalam 5 tahun terakhir, realisasi PAD pada akhir tahun 2021 diprediksi akan mengalami peningkatan secara nominal jika dibandingkan dengan realisasi

tahun 2020. Realisasi PAD pada tahun 2021 diprediksi akan mencapai ± Rp5,83 triliun, atau dengan kenaikan yang diprediksi sebesar ±7,85 persen dari realisasi PAD tahun 2020.

Proyeksi realisasi belanja APBD dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi belanja dalam 5 tahun terakhir. Dalam perhitungannya, rata-rata persentase realisasi belanja daerah dalam 5 tahun terakhir



Sumber: GFS Q2, 2021 (diolah)

yaitu 87,65 persen. Rata-rata persentase realisasi tersebut selanjutnya menjadi pengali dari pagu belanja daerah tahun 2021, sehingga belanja daerah pada akhir tahun 2021 diproyeksikan akan terealisasi sebesar ± Rp37,64 triliun.

IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

Dari realisasi Anggaran Konsolidasian (sampai dengan Triwulan II 2021) terdapat penurunan secara Y-on-Y sebesar 7,28 persen pada realisasi pendapatan pada tahun ini, dan terjadi kenaikan sebesar 12,93 persen pada realisasi belanja. Penurunan realisasi pendapatan negara memberikan sinyal bahwa pemerintah perlu memperluas potensi penerimaan negara di Aceh demi meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Disisi lain, kenaikan pada realisasi belanja memberikan sinyal positif, di mana Aceh memerlukan stimulus dari belanja pemerintah untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada beberapa tahun terakhir masih belum stabil.

Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Aceh (miliar Rp)

Uraian	Q2 2021			Realisasi Konsolidasi Q2 2020	% Kenaikan/ Penurunan
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		
A. Pendapatan Negara	1.963,77	1.615,23	3.579,00	3.859,81	-7,28%
Pendapatan Pajak	1.528,22	854,87	2.383,09	2.336,56	1,99%
Pendapatan Bukan Pajak	435,55	82,98	518,53	497,76	4,17%
Pendapatan Lainnya	0,00	677,38	677,38	1.025,49	-33,95%
B. Belanja Negara	6.254,79	11.980,07	18.234,86	16.147,22	12,93%
Belanja Pegawai	3.410,16	6.082,77	9.492,93	8.498,71	11,70%
Belanja Barang dan Jasa	1.811,06	3.076,94	4.888,00	4.135,23	18,20%
Belanja Modal	1.016,51	796,85	1.813,36	1.448,19	25,22%
Belanja Bantuan Sosial	17,06	112,39	129,45	271,80	-52,37%
Belanja Tak Terduga	0,00	34,29	34,29	141,78	-75,81%
Belanja Transfer	0,00	1.751,47	1.751,47	1.438,00	21,80%
Belanja Lainnya	0,00	125,36	125,36	213,51	-41,29%
C. Surplus/Defisit	(4.291,02)	(10.364,84)	(14.655,86)	(12.287,41)	19,28%
D. Pembiayaan	0,00	4.449,07	4.449,07	546,78	713,68%
Penerimaan Pembiayaan	0,00	4.468,71	4.468,71	561,78	695,45%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	19,64	19,64	15,00	30,93%
E. SILPA	(4.291,02)	(5.915,77)	(10.206,79)	(11.740,62)	-13,06%

Sumber: OM SPAN, Simtrada, GFS Q2, 2021 (diolah)

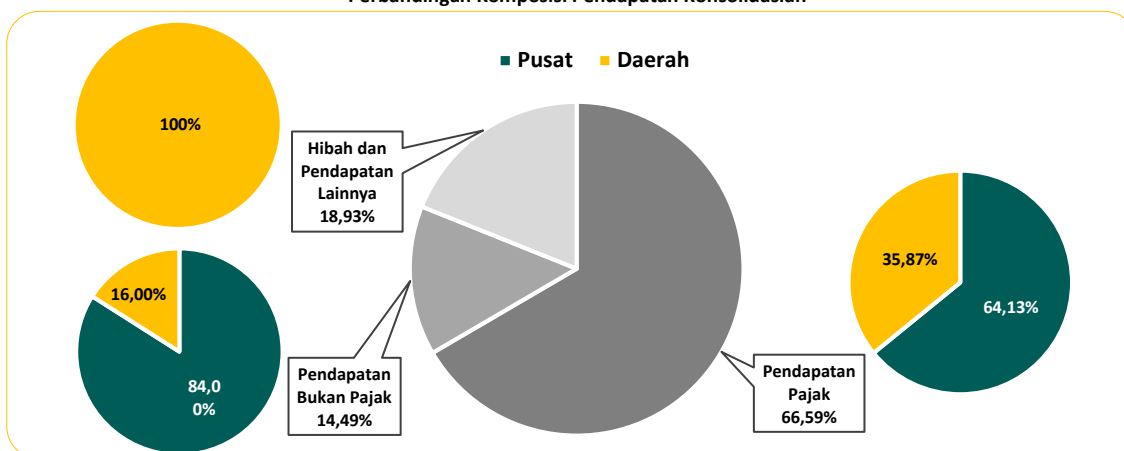
A. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Perbandingan Proporsi dan Perubahan Pendapatan Konsolidasian

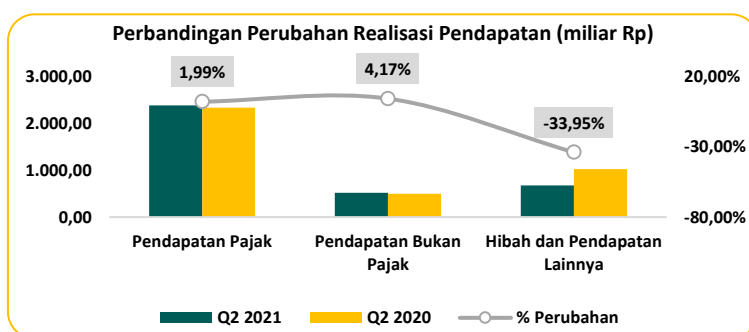
Di antara semua jenis pendapatan negara konsolidasian, realisasi pendapatan pajak memiliki proporsi paling besar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lain, yaitu sebesar 66,59 persen dari seluruh realisasi pendapatan. Pendapatan perpajakan didominasi oleh pendapatan dari pemerintah pusat dengan persentase 64,13 persen dari total pendapatan pajak. Pendapatan PNBK realisasinya juga didominasi dari pemerintah pusat, dengan rasio sebesar 84,00 persen dari total PNBK konsolidasi.

Sedangkan Pendapatan Hibah keseluruhan bersumber dari pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah.

Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian



Sumber: OM SPAN, Simtrada, GFS Q2, 2021 (diolah)



Sumber: OM SPAN, Simtrada, 2020 (diolah)

adanya penurunan yang sangat signifikan pada komponen pendapatan APBD di pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara persentase perubahannya, penurunan pada Pendapatan Lainnya merupakan yang paling signifikan (-33,95 persen). Jika diuraikan, penurunan tersebut disebabkan

2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB Aceh menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan yang menurun, di saat PDRB Aceh meningkat. Penurunan realisasi penerimaan juga tidak terlepas dari dampak wabah pandemi *Covid-19*. Tidak hanya kesehatan manusia, wabah pandemi *Covid-19* ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Ketidadaan kegiatan diluar rumah oleh seluruh masyarakat sangat memukul sektor-sektor usaha terutama UMKM. Sejalan dengan penurunan Rasio Pajak, maka Rasio Pendapatan (gabungan penerimaan pajak dan bukan pajak) terhadap PDRB Aceh Triwulan II 2021 juga

Perkembangan Rasio Pajak Aceh terhadap PDRB Aceh (miliar Rp)

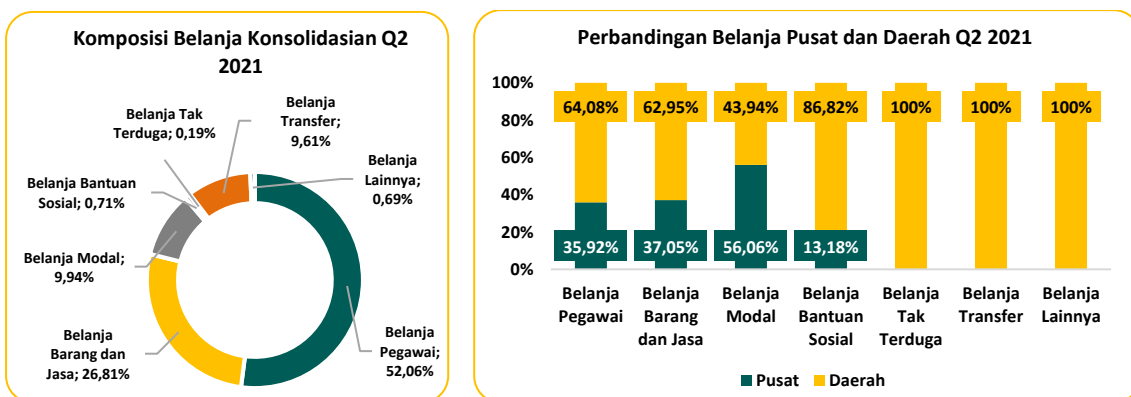
Uraian	Q2 2019	Q2 2020	Q2 2021
Penerimaan Pajak (Pusat+Daerah)	2.463,01	2.336,56	2.383,09
Penerimaan Bukan Pajak (Pusat+Daerah)	1.731,64	1.523,25	1.195,91
Total Penerimaan (Pusat+Daerah)	4.194,65	3.859,81	3.579,00
PDRB Aceh Semester I (ADHB)	79.750,00	81.490,00	87.070,00
Rasio Pajak (%)	3,09%	2,87%	2,74%
Rasio Pendapatan Terhadap PDRB	5,26%	4,74%	4,11%

Sumber: OM SPAN, BPS Aceh, GFS Q2, 2021 (diolah)

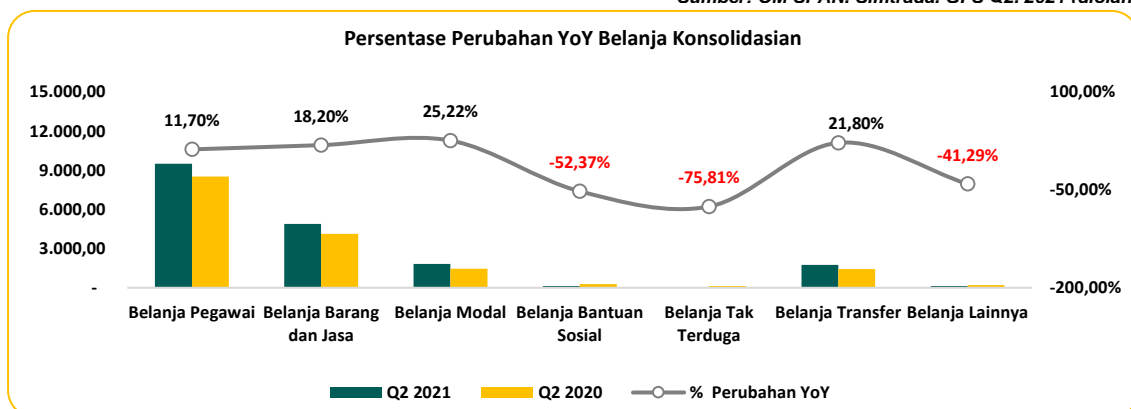
mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan kinerja pemerintah yang belum maksimal dalam menggali sumber penerimaan di tengah wabah pandemi Covid-19 yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.

B. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perubahan Belanja Konsolidasian



Sumber: OM SPAN. Simtrada. GFS Q2. 2021 (diolah)



Sumber: OM SPAN, Simtrada, GFS Q2, 2021 (diolah)

Belanja Pegawai masih merupakan kontributor terbesar dalam struktur belanja negara, dengan proporsi sebesar 52,06 persen dari total realisasi belanja (konsolidasian) sampai dengan Triwulan II 2021. Ketika dibandingkan dengan realisasi belanja pada Triwulan II 2020, terjadi kenaikan realisasi pada empat jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai (11,70 persen), Belanja Barang dan Jasa (18,20 persen), Belanja Modal (25,22 persen) dan Belanja Transfer (21,80 persen). Sedangkan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Lainnya mengalami penurunan realisasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

2. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah terhadap PDRB Aceh

Sampai dengan Triwulan II 2021, rasio belanja pemerintah terhadap PDRB Aceh sebesar 20,94 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan rasio pada Triwulan II 2020 yang sebesar 19,81 persen, sedangkan PDRB Aceh sampai dengan Triwulan II 2021 juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun

Perkembangan Belanja di Aceh terhadap PDRB Aceh (miliar Rp)

Uraian	Q1 2019	Q1 2020	Q1 2021
Realisasi Belanja Pemerintah (non transfer)	15.858,53	16.147,22	18.234,86
PDRB Aceh s.d Triwulan II 2021 (ADHB)	79.750,00	81.490,00	87.070,00
Rasio Belanja Pemerintah Terhadap PDRB	19,89%	19,81%	20,94%

Sumber: OM SPAN, BPS Aceh, GFS Q2, 2021 (diolah)

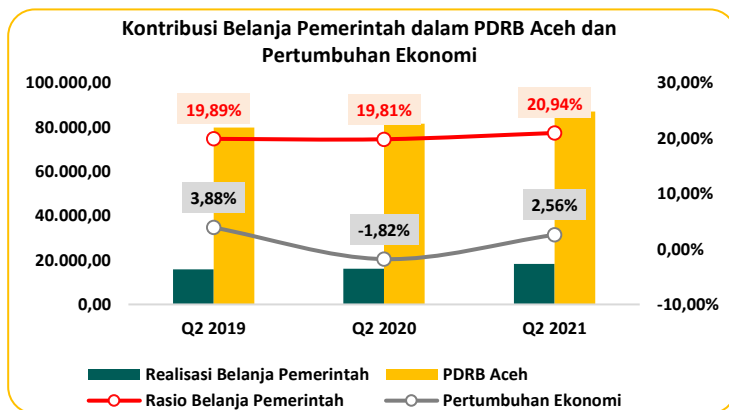
pengeluaran yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan belanja pemerintah, yaitu Pengeluaran Rumah Tangga dan PMTB.

2021, realisasi belanja pemerintah mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Berdasarkan data BPS Aceh, terdapat dua jenis

C. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Indikator Ekonomi Regional

Secara konseptual dalam teori ekonomi makro, keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dapat dilihat dalam persamaan $Y = C + I + G + (X - M)$, di mana Y =pendapatan nasional, C =konsumsi masyarakat, I =investasi, G =pengeluaran pemerintah, X =ekspor, dan M =impor. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa besaran pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap besaran pendapatan nasional/daerah (PDB/PDRB). Artinya semakin besar pengeluaran pemerintah (G) semakin besar pula pendapatan nasional/daerah. Peningkatan Y merupakan pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain penyerapan anggaran pemerintah akan membantu pertumbuhan ekonomi.

Konsumsi pemerintah menjadi salah satu kontributor yang cukup krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Grafik disamping menunjukkan perkembangan rasio realisasi belanja pemerintah (pusat dan daerah) di Aceh



Sumber: OM SPAN, BPS Aceh, GFS, 2021 (diolah)

terhadap perkembangan PDRB Aceh dan Pertumbuhan Ekonomi. Sampai dengan Triwulan II 2021, rasio belanja pemerintah terhadap PDRB Aceh sebesar 20,94 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada periode yang sama Tahun 2020 yang sebesar 19,81 persen. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa pada tahun Triwulan II 2021 perekonomian Aceh tumbuh sebesar 2,56 persen, hal tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar 1,82 persen. Dalam hal ini dapat diambil suatu hipotesis bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu variabel penting yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

V. BERITA/ISU FISKAL TERPILIH

A. Potensi Investasi Pemerintah Bagi Komoditas Unggulan Aceh

Produkt Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Salah satu perhitungan menggunakan pendekatan pengeluaran, di mana PDRB dihitung berdasarkan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik sebagai konsumsi akhir oleh masyarakat. Pemerintah mempunyai peran untuk memberikan dampak terhadap besaran pengeluaran di masing-masing komponen PDRB ini. Baik peran secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk PMTB sendiri merupakan salah satu komponen perhitungan PDRB yang merepresentasikan besaran investasi. Belanja modal pemerintah menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam menentukan besaran PMTB suatu wilayah.

PDRB Sisi Permintaan Atas Dasar Harga Konstan (triliun Rp)

Komponen	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)	56,6	58,6	60,4	62,3	64,2	66,3	68,6	71,0	73,7	73,3
Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT)	1,5	1,6	1,8	2,1	2,0	2,1	2,3	2,4	2,7	2,6
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)	19,9	21,5	22,7	23,1	24,0	19,9	20,9	21,5	23,3	21,5
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	33,0	34,9	34,7	36,6	37,9	40,6	39,4	40,7	43,5	45,1
Perubahan Inventori (PI)	0,4	1,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	(0,1)	0,0	0,0	(0,1)
Ekspor Barang dan jasa	48,3	47,3	48,8	47,2	45,6	46,2	50,9	54,4	56,3	3,6
Impor Barang dan Jasa	54,9	56,6	56,6	57,8	60,8	58,8	60,7	63,2	67,4	0,6
P D R B	104,9	108,9	111,8	113,5	112,7	116,4	121,2	126,8	132,1	131,6
Kontribusi PMTB	31,4%	32,0%	31,1%	32,2%	33,6%	34,9%	32,5%	32,1%	32,9%	34,3%

Sumber: BPS Aceh, 2021 (diolah)

Jika melihat perkembangan PDRB Aceh selama 10 tahun terakhir, angka PMTB di Aceh seperti tabel di atas menunjukkan perkembangan positif dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,6 persen. Meskipun dalam 10 tahun terakhir, PMTB baru dapat memberikan rata-rata kontribusi pada kisaran 32,7 persen.

Jika melihat tabel di atas, kontribusi belanja modal yang direalisasikan di Aceh terhadap PMTB, menunjukkan tren menurun dengan rata-rata kontribusi 22,02% seiring dengan menurunnya realisasi

Kontribusi Belanja Modal Terhadap PMTB (dalam triliun Rp)

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Belanja Modal APBN di Aceh	2,6	3,1	2,7	2,8	2,1
Belanja Modal APBD	8,59	7,40	5,21	6,55	4,65
Total Belanja Modal di Aceh	11,2	10,5	7,9	9,4	6,7
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	40,6	39,4	40,7	43,5	45,1
Kontribusi Belanja Modal terhadap PMTB	27,5%	26,7%	19,4%	21,6%	14,9%

Sumber: LKPP 2016-2019, LKPD Audited, LKPP 2020 Unaudited, dan BPS Aceh

belanja modal di Aceh. Bahkan di tahun 2020 penurunannya sangat signifikan yang salah satu penyebabnya adalah merebaknya pandemi *Covid-19*, sehingga

pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang bersumber dari belanja modal tertunda atau bahkan dihapus dan dialihkan menjadi belanja penanganan *Covid-19*.

Perlu ada inisiatif pemerintah daerah di Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selain dari realisasi belanja atau konsumsi pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. Kebijakan ini dalam rangka mendorong investasi yang bersumber dari APBN, imbal hasil, pendapatan dari layanan atau usaha, hibah dan sumber lain yang sah.

Hal ini setidaknya menjadi peluang bagi pemerintah daerah di Aceh untuk mengembangkan industri pengolahan komoditas unggulan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, yaitu:

1. Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan terbesar di Aceh dengan luas lahan mencapai 237.769 Ha yang dikelola oleh masyarakat dengan produksi tahunan sebesar 440.087 ton di tahun 2018. Sementara perkebunan seluas 219.322 Ha dikelola oleh perusahaan besar yang menghasilkan 338.127 ton CPO pada tahun 2017.

2. Kopi Gayo

Untuk kopi jenis ini, Aceh telah mengekspor 9.095.881 Kg biji kopi ke 26 negara. Permintaan kopi Gayo di pasar domestik dan luar negeri sangat tinggi. Saat ini kopi dijual dalam bentuk biji hijau. Ada potensi peningkatan nilai tambah kopi Aceh melalui pembangunan industri pengolahan kopi modern.

3. Kakao

Komoditas dengan luas lahan mencapai 99.342 Ha dan produksi 39.296 ton, perlu dikembangkan strategi penciptaan industri hilirisasi kakao yang berkelanjutan.

4. Nilam

Aceh sebagai salah satu produsen nilam dengan produksi mencapai 178 ton/Ha di lahan seluas 1.210 Ha. Aceh memiliki potensi untuk pengembangan industri pengolahan nilam di wilayah Aceh Jaya, sebagai salah satu produsen nilam utama di Aceh.

5. Peternakan

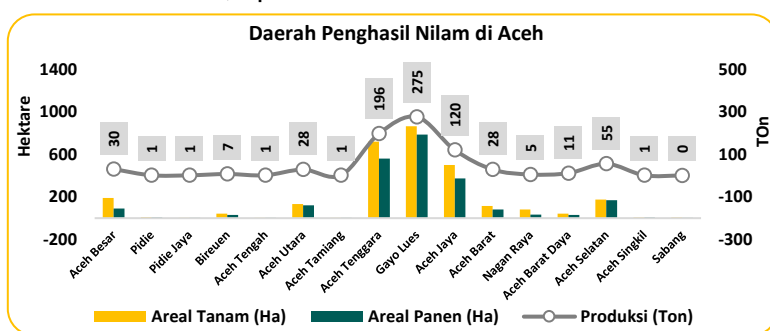
Aceh telah membuat perencanaan pengembangan proyek kawasan padang penggembalaan seluas 18.569 Ha yang terintegrasi dengan pertanian dan perkebunan. Proyek ini dikembangkan dengan konsep pembibitan dan penggemukan sapi dengan membangun irigasi dan padang penggembalaan, pembangunan infrastruktur, pembangunan *feedlot*, kandang pembibitan dan penggemukan sapi.

Investasi pemerintah dan kebutuhan pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan Aceh ini sudah saatnya mulai dikaji bersama sehingga *demand* dan *supply* dalam sektor investasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi Aceh.

B. Nilam Sebagai Potensi Nilai Tambah Sektor Pertanian Aceh

Salah satu sektor unggulan dan memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB Aceh, produksi pertanian (dan perkebunan) dapat ditingkatkan nilai tambahnya untuk masyarakat melalui pengembangan industri pengolahan, dengan harapan dapat selalu dihasilkan produk turunan, bukan hanya sebatas produk komoditas saja.

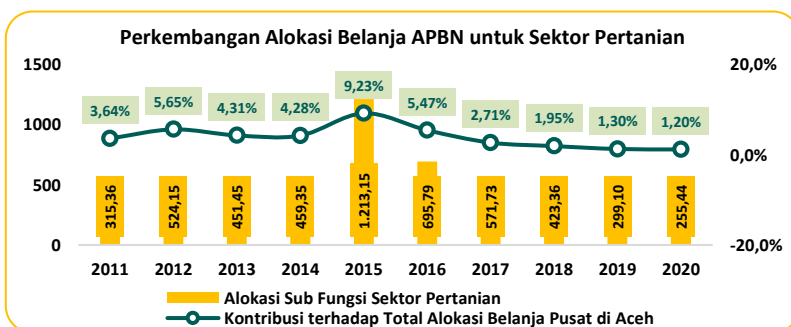
Selain memiliki beberapa komoditas unggulan seperti kopi, tanaman padi, dan sawit, Aceh juga memiliki komoditas lain yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan nasional, salah satunya yaitu nilam. Dalam konteks tanaman nilam, Aceh memiliki kualitas nilam yang sangat baik. Hasil penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) menyebutkan bahwa minyak nilam asal Aceh memiliki kandungan zat minyak (rendemen) 2,5 hingga 3,3 persen, sementara rendemen kualitas minyak nilam dunia rata-rata 2,5 persen.



Sumber: Bappeda Aceh, 2021(diolah)

Meskipun memiliki kualitas yang sangat baik, nilam Aceh justru lemah dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu perihal daya tawar harga. Lemahnya kelembagaan petani nilam sehingga pengelolaan dan pemasaran tidak terjadi dengan semestinya. Selama ini, sistem pemasaran minyak nilam tidak menguntungkan bagi masyarakat petani nilam. Harga kerap berfluktuasi dan dikendalikan pembeli dari luar daerah ataupun luar negeri. Kelemahan yang kedua terkait perkebunan nilam yaitu pola penanaman yang masih harus berpindah-pindah demi mendapatkan hasil produksi kualitas bagus.

Perlu langkah strategis untuk mendapatkan alternatif pengolahan Nilam ini. Dengan keterbatasan lahan dan dukungan alokasi sektor pertanian dari APBN yang



Sumber: Monev PA, 2021(diolah)

semakin menurun sejak tahun 2016, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan industri pengolahan Nilam yang selama ini produk yang dihasilkan baru berupa minyak nilam. Pengembangan industri hilir nilam menjadi produk yang lebih tinggi nilai jualnya seperti produk minyak wangi, aroma terapi, kosmetik, obat-obatan dan perlengkapan mandi, perlu untuk segera diinisiasi oleh pemerintah daerah. Salah satunya dengan memanfaatkan peluang pembiayaan melalui investasi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
Komplek Gedung Keuangan Negara, Gedung A Lantai II-III
Jl. Teungku Chik Ditiro
Telepon (0651) 22462, Faksimile (0651) 22432
Banda Aceh 2341

KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN
PROVINSI ACEH